

## MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL: PENDEKATAN DEBIROKRATISASI UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BAUBAU

### *PROMOTING LOCAL ECONOMIC GROWTH: A DEBUREAUCRATIZATION APPROACH TO UMKM DEVELOPMENT IN BAUBAU CITY*

Irwan Ade Saputra<sup>1\*</sup> dan Zarni Adia Purna<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Politik Pemerintahan Universitas Hasanuddin  
email: irwan\_adhe@unhas.ac.id

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar  
email: zarni.adia.purna@unm.ac.id

#### Article History

Submitted: 01 April 2024  
Review : 17 Mei 2024  
Publish : 26 Mei 2024

#### Kata kunci (Keywords):

Debirokratisasi;  
Pertumbuhan Ekonomi  
Daerah; UMKM  
(*Debureaucratization;*  
*Regional Economic*  
*Growth; UMKM*)

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola debirokratisasi dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan tipe eksploratif. Temuan menunjukkan bahwa langkah-langkah debirokratisasi, seperti pemanfaatan platform digital untuk memberdayakan komunitas kreatif, penyederhanaan proses administratif dalam penyediaan dukungan modal dan pelatihan, serta penerbitan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, telah meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan bagi UMKM. Meskipun demikian, masih terdapat kendala struktural dalam ekosistem UMKM yang mempengaruhi pertumbuhannya, seperti akses terhadap modal dan infrastruktur yang terbatas. Selain itu, implementasi kebijakan dan program-program pendukung UMKM masih belum optimal, menyebabkan keterbatasan kontribusi UMKM terhadap PDRB. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami faktor-faktor struktural yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM, seperti akses terhadap modal dan infrastruktur, serta melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi kebijakan dan program-program yang mendukung UMKM dengan mempertimbangkan faktor-faktor administratif dan institusional yang memengaruhi efektivitasnya.

#### Abstract

*This research aims to examine the pattern of debureaucratization in the activities carried out by the government to support SMEs. The research method used is qualitative research with an exploratory type. Findings indicate that debureaucratization measures, such as utilizing digital platforms to empower creative communities, simplifying administrative processes in providing financial support and training, as well as issuing policies supporting SME development, have enhanced accessibility and responsiveness of services for SMEs. However, there are still structural constraints in the SME ecosystem affecting its growth, such as limited access to finance and infrastructure. Moreover, the implementation of policies and*

\* Penulis Korespondensi  
Email: irwan\_adhe@unhas.ac.id

*programs supporting SMEs is still suboptimal, resulting in limitations on SMEs' contribution to the Gross Regional Domestic Product (GRDP). Further research is recommended to delve deeper into the structural factors influencing SME growth, such as access to finance and infrastructure, and to conduct further evaluation of the implementation of policies and programs supporting SMEs, taking into account the administrative and institutional factors that affect their effectiveness.*

---

## **PENDAHULUAN**

Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan solusi menciptakan peluang kerja ditengah tidak sebandingnya rasio antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Dengan jumlah UMKM sekitar 65,46 juta unit, Indonesia berada di posisi unggul dibanding negara-negara tetangga di ASEAN. UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi dengan menyerap 97% tenaga kerja, memberikan kontribusi signifikan sebesar 60,3% terhadap PDB, dan berperan penting dalam ekspor nasional dengan kontribusi sebesar 14,4%. Namun, masih diperlukan upaya meningkatkan kinerja UMKM, khususnya dalam hal kontribusi terhadap PDB dan ekspor, agar dapat bersaing lebih baik dengan negara-negara sekitarnya seperti Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam ([Dinutistomo & Lubis, 2021](#)). Selama krisis ekonomi tahun 1997-1998, UMKM memperlihatkan ketahanannya karena kemampuannya dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan elastisitas terhadap pendapatan rendah. Mereka juga tidak terlalu bergantung pada modal dari lembaga keuangan, sehingga mampu bertahan ketika sektor perbankan mengalami kesulitan (Suci, 2017). Dikarenakan sifatnya yang adaptif, maka pemerintah pusat maupun daerah akhirnya mendorong pengembangan serta memberikan beragam stimulus kepada pelaku UMKM.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau memiliki peran penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja UMKM, khususnya di sektor kuliner seperti makanan cemilan dan oleh-oleh di Kota Baubau. Kota Baubau memiliki potensi besar sebagai kota jasa dan perdagangan, karena merupakan salah satu jalur penghubung pelayaran bagi wilayah nusantara timur dan barat. Selain itu, kota ini juga menjadi daerah akumulator bahan baku dari daerah sekitarnya, seperti daerah Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan, terutama untuk kacang mete ([Supardi et al., 2017](#)).

Meskipun demikian, peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM di sektor kuliner masih belum optimal. Data dari website Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMKM di sektor kuliner setiap tahun, namun kenaikan ini tidak membawa kontribusi bagi Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) yang ditunjukkan melalui data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap PDRB Kota Baubau setiap tahunnya. Pada tahun 2022,

sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 3,90% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Baubau, menunjukkan penurunan sebesar 0,06% dibandingkan dengan tahun 2021. Demikian pula, pada tahun 2021, sektor industri pengolahan mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,03% dibandingkan dengan tahun 2020 ([Mey et al., 2018](#)).

Gejala penurunan produktivitas industri setidaknya dapat dilihat sebagai indikasi adanya gejala overbirokrasi atau birokrasi yang berlebihan. Ini dapat menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tengah keterbatasan sumber daya dan kapasitas administratif yang dimiliki oleh UMKM, prosedur birokrat yang rumit dan berbelit dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkembang dan bersaing di pasar. Proses perizinan yang memakan waktu dan persyaratan yang membebani dapat menyulitkan UMKM untuk mendapatkan izin usaha atau memperluas kegiatan operasional mereka ([Prasetyo, 2020](#)). Selain itu, biaya tambahan yang terkait dengan birokrasi yang berlebihan, seperti biaya administrasi dan pengurusan perizinan, dapat menjadi beban tambahan bagi UMKM yang mungkin memiliki margin keuntungan yang tipis ([Yusuf et al., 2022](#)). Hal ini dapat menghambat investasi, pertumbuhan, dan inovasi di sektor UMKM. Selain itu, overbirokrasi juga dapat menciptakan peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merugikan UMKM lebih lanjut dengan memperkuat iklim bisnis yang tidak sehat dan tidak merata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan dan menyederhanakan prosedur administratif untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan inklusif ([Putri et al., 2020](#)).

Seiring dengan Upaya untuk mengurangi birokrasi, debirokratisasi merupakan pendekatan yang relevan dalam upaya menghilangkan dampak negatif overbirokrasi terhadap pertumbuhan UMKM dan sekaligus menyesuaikan diri dengan tren terbaru tata kelola pemerintahan ([Kertati, 2021](#)). Melalui debirokratisasi, pemerintah dapat mengurangi beban administratif yang membebani UMKM, seperti prosedur perizinan yang rumit dan biaya administratif yang tinggi. Langkah-langkah debirokratisasi seperti digitalisasi proses perizinan, penyederhanaan regulasi, dan pemberian pelatihan tentang kepatuhan administratif dapat membantu mempercepat proses bisnis UMKM, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan biaya tambahan yang tidak perlu. Selain itu, dengan mengurangi hambatan birokrasi, debirokratisasi juga dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM untuk berinovasi, berkembang, dan bersaing di pasar ([Seno, 2020](#)). Dalam konteks tren terbaru tata kelola pemerintahan, debirokratisasi kemudian menjadi inisiatif pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan memperkenalkan debirokratisasi, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan layanan publik, dan memperkuat kinerja ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, debirokratisasi tidak hanya relevan dengan kebutuhan mendesak

untuk mendukung pertumbuhan UMKM, tetapi juga konsisten dengan arah perkembangan tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif ([Kertati, 2021](#)).

Dalam konteks debirokratisasi sebagai upaya untuk menekan overbirokrasi dalam pengembangan UMKM di Kota Baubau, terdapat beberapa kontradiksi yang menjadi fenomena menarik untuk diteliti, diantaranya adalah antara penyederhanaan proses perizinan dan pengawasan kualitas. Di satu sisi, penyederhanaan ini bertujuan untuk memudahkan UMKM dalam memulai dan menjalankan bisnisnya dengan mengurangi tahapan birokrasi yang berbelit. Namun, di sisi lain, pengawasan yang kurang ketat akibat prosedur yang lebih simpel dapat menimbulkan masalah terkait kualitas produk dan layanan, serta kepatuhan terhadap standar keamanan. Selain itu, digitalisasi proses birokrasi dapat mempercepat dan mempermudah urusan administratif, tetapi tidak semua pelaku UMKM memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, terutama di daerah yang kurang berkembang, menciptakan kesenjangan digital. Lebih lanjut, kebijakan penghapusan atau pengurangan biaya administrasi yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM juga dapat mengurangi pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari biaya-biaya tersebut, sehingga berpotensi mempengaruhi pelayanan publik dan dukungan terhadap UMKM. Selain itu, meskipun upaya penyederhanaan prosedur birokrasi diharapkan dapat mengatasi kompleksitas regulasi yang ada, regulasi yang tumpang tindih atau tidak jelas dapat tetap menjadi hambatan. Terakhir, sementara pemerintah berusaha memberikan dukungan dan fasilitasi untuk UMKM, terlalu banyak campur tangan bisa menghambat kemandirian dan inovasi di sektor ini.

Dari berbagai fenomena diatas artikel ini berfokus untuk membahas bagaimana pemerintah Kota Baubau menjalankan pola debirokratisasi dan program pemberdayaan melalui terma optimalisasi. Sebab hal dapat memunculkan kontradiksi hierarkhi dan prosedural dengan aksesibilitas UMKM akan sumberdaya birokrasi yang dilepas pemerintah melalui debirokratisasi. Oleh karenanya tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi aktualisasi dari gagasan debirokratisasi dalam tindakan pemerintah untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Kota Baubau

Penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa regulasi yang lebih ringan dan proses perizinan yang sederhana dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM di berbagai negara menyoroti pentingnya reformasi regulasi untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM ([Csath, 2021](#); [Lampropoulou, 2021](#)). Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi, termasuk debirokratisasi, dapat memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan UMKM, terutama di negara-negara Afrika ([International Finance Corporation, 2021](#); [Yusuf et al., 2022](#)). Namun, proses perizinan yang rumit masih menjadi hambatan dalam akses modal bagi UMKM ([Syafiq, 2019](#)). Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga dianggap penting dalam membentuk kebijakan debirokratisasi yang mendukung pertumbuhan UMKM ([Noegroho & Arif,](#)

[2023](#)). Analisis tentang kebijakan hukum, sistem keuangan, dan regulasi menunjukkan bahwa kebijakan yang kondusif dapat mendorong pertumbuhan UMKM ([Salsabila et al., 2021](#)). Selain itu, [Harseno, \(2017\)](#) menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan sederhana bagi UMKM dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Laporan [International Finance Corporation \(2021\)](#) juga menyoroti perlunya regulasi yang kondusif untuk menciptakan lingkungan usaha yang baik bagi pertumbuhan UMKM.

## **KAJIAN LITERATUR**

### ***Tinjauan Debirokratisasi***

Definisi birokrasi merupakan landasan penting dalam memahami konsep debirokratisasi. Menurut Weber, birokrasi adalah suatu sistem organisasi yang didasarkan pada aturan, hierarki, dan spesialisasi tugas, di mana keputusan-keputusan dibuat secara rasional dan impersonal. Dalam teori debirokratisasi, pemahaman tentang birokrasi ini menjadi penting karena debirokratisasi seringkali bertujuan untuk mengurangi kekakuan dan kendala-kendala yang terkait dengan struktur birokratik. Weber juga menyoroti bahwa birokrasi cenderung berkembang menjadi institusi yang otonom dan mengejar kepentingan sendiri. Hal ini menegaskan perlunya reformasi birokrasi untuk membatasi perilaku otonom dan memastikan bahwa birokrasi beroperasi secara efisien sesuai dengan tujuan organisasionalnya ([Kovač, 2021](#)).

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja birokrasi memiliki peran yang signifikan dalam teori debirokratisasi. Struktur organisasi birokrasi, sebagai salah satu faktor utama, memiliki dampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi. Struktur organisasi yang jelas dan hierarki dapat meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif ([Johnston & Holt, 2021](#)). Selain itu, budaya organisasi juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan keputusan birokrasi. budaya organisasi yang kuat dapat memengaruhi norma, nilai, dan sikap individu dalam organisasi, yang pada gilirannya mempengaruhi cara kerja dan kinerja birokrasi ([Wakisaka, 2022](#)). Selain faktor internal, faktor eksternal juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja birokrasi. Di antara faktor eksternal ini, tekanan politik, persyaratan hukum, dan tuntutan masyarakat menjadi penting dalam membentuk respons birokrasi terhadap lingkungan eksternalnya. Interaksi antara birokrasi dan lingkungannya merupakan faktor kunci yang memengaruhi adaptabilitas dan efektivitas birokrasi dalam menjalankan tugas-tugasnya ([Martini et al., 2019](#)).

Konsep dan strategi debirokratisasi memainkan peran penting dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan. Penyederhanaan regulasi adalah salah satu konsep utama dalam debirokratisasi, yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dan kekakuan

dalam sistem regulasi. Sebagai contoh, [Kovač, \(2021\)](#) menyoroti pentingnya memperkenalkan regulasi yang lebih sederhana dan terfokus untuk memastikan bahwa prosedur administratif tidak membebani lebih dari yang diperlukan. Selain itu, peningkatan efisiensi merupakan aspek penting dari strategi debirokratisasi. Peningkatan efisiensi birokrasi dapat dicapai melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, pemangkasan birokrasi yang berlebihan, dan peningkatan dalam manajemen kinerja. Selanjutnya, inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi fokus penting dalam debirokratisasi. inovasi administratif dapat membantu menciptakan proses yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik ([Vodenko et al., 2019](#)).

Dampak dari implementasi debirokratisasi memiliki relevansi yang signifikan terhadap berbagai aspek sistem pemerintahan. Efektivitas pemerintahan dapat ditingkatkan melalui debirokratisasi dengan memperbaiki proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Debirokratisasi dapat mempercepat siklus keputusan dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu, sehingga meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Selanjutnya, debirokratisasi juga berpotensi meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan mengurangi pemborosan sumber daya dan biaya administratif yang berlebihan ([Vallentin, 2022](#)). debirokratisasi dapat menghasilkan penghematan biaya dan waktu dalam penyelenggaraan layanan publik, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Selain itu, debirokratisasi juga berdampak pada akuntabilitas pemerintahan dengan memperjelas tanggung jawab dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik ([Tsvykh & Nelipa, 2019](#)). Terakhir, responsivitas pemerintah juga dapat ditingkatkan melalui debirokratisasi dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan pelayanan publik dimana debirokratisasi dapat mempercepat respons pemerintah terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintahan ([Wang et al., 2022](#)). Dengan demikian, implementasi debirokratisasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pemerintahan, meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitasnya.

Di sisi lain, dalam konteks liberalisasi pasar, debirokratisasi dapat membuka peluang akses pasar yang lebih luas bagi UKM dengan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan investasi. Studi oleh ([Vallentin, 2022](#)) menunjukkan bahwa debirokratisasi dapat meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan mengurangi regulasi yang berlebihan. Terkait dengan peningkatan daya saing daerah, debirokratisasi dapat membantu memperbaiki iklim investasi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru, dimana debirokratisasi yang efektif dapat meningkatkan daya tarik investasi di tingkat lokal, mempercepat

pertumbuhan ekonomi regional, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah ([Fasyehudin et al., 2022](#)).

Dalam paradigma institusional, debirokratisasi merupakan suatu proses transformasi yang mencakup restrukturisasi peran, prosedur, dan praktik administratif dalam suatu lembaga atau sistem pemerintahan. Dalam kerangka ini, debirokratisasi tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, tetapi juga sebagai suatu bentuk adaptasi terhadap tuntutan dan dinamika lingkungan institusional yang berubah ([Ting & Feng, 2019](#)). Teori institusional menekankan bahwa struktur, norma, dan nilai-nilai dalam institusi mempengaruhi perilaku dan keputusan aktor dalam sistem tersebut. Dalam konteks debirokratisasi, perubahan dalam struktur dan norma institusional diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pengurangan birokrasi yang tidak efisien dan peningkatan kinerja pemerintahan. Institusi pemerintahan cenderung memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan ([Zhang et al., 2023](#)). Oleh karena itu, debirokratisasi membutuhkan adanya perubahan dalam budaya organisasi dan norma-norma yang mengarah pada praktik birokrasi yang lebih efisien dan responsif. Dalam konteks ini, debirokratisasi tidak hanya melibatkan perubahan struktural, tetapi juga perubahan dalam praktik dan norma-norma yang mendasari perilaku birokrasi. Dengan demikian, debirokratisasi dalam paradigma institusional dipandang sebagai suatu proses sosial yang melibatkan interaksi kompleks antara aktor, struktur, dan norma dalam institusi pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan ([Peters, 2021](#)).

### ***Mengidentifikasi Debirokratisasi***

Untuk mengidentifikasi adanya debirokratisasi dalam program pemerintah, khususnya dalam konteks pemberdayaan dan optimalisasi UMKM, beberapa variabel utama yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, kecepatan proses perizinan yang diukur melalui pengurangan rata-rata waktu pemrosesan perizinan sebelum dan sesudah implementasi program debirokratisasi. Kedua, biaya administrasi yang dilihat dari penurunan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM untuk mengurus perizinan dan administrasi. Ketiga, jumlah tahapan prosedural, yang mengindikasikan penyederhanaan dan pengurangan jumlah tahapan yang harus dilalui oleh pelaku UMKM dalam proses perizinan dan administrasi. Keempat, aksesibilitas dan transparansi informasi, di mana kemudahan akses terhadap informasi mengenai perizinan dan administrasi diukur melalui ketersediaan informasi yang jelas, mudah diakses, dan transparan melalui platform digital atau layanan satu pintu. Kelima, penggunaan teknologi informasi yang terlihat dari adanya sistem e-governance, layanan online, dan digitalisasi dokumen yang memfasilitasi proses perizinan dan administrasi. Keenam, tingkat kepuasan pelaku UMKM, yang diukur melalui hasil survei kepuasan

yang menunjukkan peningkatan kepuasan terhadap kemudahan dan efisiensi layanan perizinan dan administrasi. Ketujuh, jumlah UMKM yang terdaftar, yang diindikasikan oleh peningkatan jumlah UMKM yang berhasil mendaftar dan memperoleh izin usaha dalam periode tertentu setelah implementasi program debirokratisasi. Kedelapan, keluhan dan masalah yang dilaporkan, dengan indikator penurunan jumlah keluhan yang diterima dan penyelesaian masalah dengan cepat. Kesembilan, intervensi pemerintah, yang dilihat dari pengurangan frekuensi dan kompleksitas intervensi pemerintah yang tidak perlu dalam proses perizinan dan administrasi. Terakhir, kualitas pelayanan, yang diukur melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait berdasarkan standar pelayanan publik yang ditetapkan.

Dalam konteks pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), debirokratisasi memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitasnya. Pertama, penyederhanaan prosedur perizinan usaha, melalui pengurangan dokumen dan tahapan proses serta pemanfaatan teknologi digital, dapat menjadi tanda adanya upaya debirokratisasi (Putri et al., 2020). Selanjutnya, penurunan biaya administratif yang harus ditanggung oleh UMKM juga dapat menjadi indikator penting, karena hal ini menunjukkan pengurangan beban bagi pelaku usaha (Kertati, 2021). Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta peningkatan aksesibilitas informasi dan mekanisme umpan balik bagi UMKM, juga mencerminkan langkah-langkah debirokratisasi yang berhasil (Yusuf et al., 2022). Dukungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait, seperti pelatihan dan konsultasi, juga merupakan bagian integral dari upaya debirokratisasi untuk membantu UMKM mematuhi regulasi dengan lebih baik. Pengurangan hambatan birokrasi yang menghalangi pertumbuhan dan pengembangan UMKM, bersamaan dengan perubahan budaya organisasi menuju pelayanan yang lebih responsif, juga mencerminkan efektivitas debirokratisasi dalam konteks pemberdayaan UMKM (Noegroho & Arif, 2023; Putri et al., 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif yang fokus pada penggambaran, deskripsi, dan pengungkapan fenomena yang terjadi dalam peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM di Kota Baubau. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM serta pelaku UMKM di Kota Baubau. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data primer melalui wawancara dan observasi, serta sumber sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik dan instrument penarikan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara



yang disusun untuk menemukan indikasi-indikasi tertentu sesuai fokus penelitian. Adapun informan penelitian terdiri dari pihak terkait dalam proses pengembangan UMKM, seperti Kepala Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Baubau, Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, serta para pelaku UMKM di Kota Baubau. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN**

Pemerintah Kota Baubau memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal dan merupakan sumber utama lapangan kerja di banyak negara. Dalam rangka memperkuat sektor UMKM, pemerintah sering kali melakukan berbagai aktivitas untuk memberikan dukungan dan stimulus. Namun, dalam menjalankan perannya, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan debirokratisasi, yaitu upaya untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan yang dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan UMKM. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi beberapa aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM dan melihatnya dari perspektif debirokratisasi. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa dukungan pemerintah untuk UMKM tidak hanya efektif tetapi juga efisien, tanpa membebani para pelaku usaha dengan birokrasi yang berlebihan.

### ***Memberdayakan Komunitas Kreatif***

Pemerintah memainkan peran dalam memberdayakan komunitas kreatif dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke sumber daya, infrastruktur, atau jaringan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Namun, dalam melakukan hal ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses pemberian dukungan tidak melibatkan birokrasi yang berlebihan atau menghambat inovasi. Penyederhanaan proses pengajuan permohonan atau pencairan dukungan, serta memperhatikan kebutuhan unik dari setiap komunitas kreatif, dapat membantu dalam mengurangi birokrasi yang tidak perlu.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau telah berhasil dalam memberdayakan komunitas kreatif di bidang kuliner makanan cemilan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka mengumpulkan para pelaku UMKM dalam satu grup *WhatsApp* yang menjadi tempat untuk berbagi informasi, mulai dari pelatihan hingga acara pameran atau festival UMKM. Salah satu informan menyebutkan bahwa grup *WhatsApp* tersebut memudahkan mereka dalam mendapatkan informasi terkait pelatihan, bantuan barang, dan acara festival seperti yang ditunjukkan dalam wawancara dengan informan yang menyebutkan;

*“Kami mengundang para pelaku UMKM Kuliner makanan cemilan untuk bergabung dalam 1 (satu) grup WhatsApp. Grup WhatsApp tersebut dijadikan tempat untuk saling berbagi informasi. Selain itu, kami juga mengadakan pameran, festival, dan bazaar untuk mempromosikan dan menjual produk olahan para pelaku UMKM”.*

Hal yang senada diungkapkan oleh informan lainnya, yang menyatakan bahwa keberadaan grup *WhatsApp* memudahkan para pelaku UMKM dalam mendapatkan informasi terkait usaha mereka, bahkan menciptakan persaingan usaha yang sehat seperti yang ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut;

*”Ada grup WhatsApp yang memudahkan kami para pelaku UMKM dalam mendapatkan informasi terkait usaha kami. Ini juga berdampak baik karna menciptakan persaingan usaha yang sehat””*

Dalam hal ini mayoritas informan menyebutkan jika grup *WhatsApp* yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM mempermudah komunikasi antara pelaku usaha dan dinas serta menjadi tempat untuk berbagi informasi terkait usaha. Dengan demikian, inisiatif ini telah membantu para pelaku UMKM dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka.

### ***Menyediakan Dukungan Modal***

Salah satu bentuk dukungan yang penting bagi UMKM adalah dukungan modal. Dalam hal ini, pemerintah dapat memainkan peran dalam menyediakan akses yang lebih mudah ke modal untuk UMKM. Dari perspektif debirokratisasi, penting bagi pemerintah untuk mengurangi birokrasi yang terkait dengan proses aplikasi dan pencairan dana. Proses aplikasi yang rumit atau persyaratan yang berlebihan dapat menjadi hambatan bagi UMKM untuk mendapatkan akses ke modal yang mereka butuhkan.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau memberikan bantuan barang kepada pelaku UMKM untuk mendukung pengembangan usaha. Pada tahun 2020, bantuan barang senilai Rp 1.8 miliar disalurkan kepada pelaku UMKM dalam bentuk peralatan produksi seperti etalase, blender, mixer roti, mesin handsealer, oven roti, mesin press cup, kemasan, tenda lapak, kompor, oven, gerobak jualan, dan peralatan pertukangan. Sementara pada tahun 2022, sekitar Rp 935 juta disalurkan kepada sekitar 100 pelaku UMKM dalam bentuk peralatan produksi kuliner seperti mixer roti, blender, etalase, kompor, kulkas, oven, dan handsealer.

Dari wawancara dengan informan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, terungkap bahwa bantuan yang diberikan berupa barang alat produksi seperti mixer, blender, dan etalase, seperti yang ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut;

*”Bantuan yang diberikan Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau kepada para pelaku UMKM kuliner itu berupa barang alat produksi. Banyak bantuan barang alat produksi yang sudah*

*diberikan contohnya seperti mixer dan blender dan sebagainya. Selain itu, kami juga memberikan etalase”*

Namun, meskipun bantuan barang telah diberikan, beberapa pelaku UMKM masih menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka. Ini juga searah dengan informan lainnya yang menyatakan menyatakan kebutuhan akan bantuan yang lebih konkret dalam hal pemasaran, juga menyoroti pentingnya optimalisasi bantuan dalam pemasaran produk seperti yang terlihat dalam kutipan wawancara berikut;

*”Bantuan barang yang diberikan memang sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksi usaha. Tetapi, kami masih kesulitan dalam memasarkan produk usaha kami. Kami ingin ada kepastian, sehingga kami dapat terus berproduksi. Kami pelaku UMKM butuh bantuan yang lebih konkrit dalam hal pemasaran. Kami ingin pemerintah kota membantu kami untuk menjual produk kami ke badan usaha besar yang ada di kota”*

Dari hasil penelitian ini, meskipun Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau telah memberikan bantuan barang kepada pelaku UMKM, masih ada tantangan dalam hal pemasaran produk. Pelaku UMKM membutuhkan lebih banyak bantuan dari pemerintah kota untuk memfasilitasi pemasaran produk mereka, terutama untuk menjual produk ke entitas bisnis yang lebih besar di kota tersebut. Hal lainnya adalah bahwa bantuan modal langsung dari pemerintah daerah memberikan dampak positif dalam mengurangi hambatan birokrasi yang sering dialami oleh pelaku UMKM. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pengembangan usaha dan memperluas jangkauan pasar tanpa terkendala oleh proses birokrasi yang memakan waktu dan tenaga. Jika sebelumnya pelaku UMKM kesulitan mendapatkan modal dari bank karena berbagai persyaratan yang rumit dan proses yang panjang. Namun, dengan adanya bantuan modal langsung dari pemerintah daerah, mereka dapat dengan cepat memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha tanpa terbebani oleh birokrasi yang berbelit-belit.

### ***Memberikan Pelatihan dan Bantuan Subsidi***

Meskipun memberikan pelatihan dan bantuan subsidi adalah langkah yang sangat penting untuk mendukung pengembangan UMKM, namun pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses penyediaan pelatihan dan subsidi tersebut tidak terlalu rumit atau memerlukan birokrasi yang berlebihan. Penyederhanaan proses pendaftaran, evaluasi, dan pencairan bantuan dapat membantu mengurangi beban birokrasi bagi UMKM.

Dalam upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah Kota Baubau memberikan berbagai fasilitas kepada pelaku usaha, termasuk di antaranya adalah pelatihan dan bantuan barang. Pelatihan diselenggarakan satu hingga dua kali dalam setahun, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat dua pelatihan yang dilakukan, yaitu pelatihan diversifikasi olahan rumput laut dan buah

kundur menjadi makanan cemilan. Pada tahun 2022, hanya dilakukan satu pelatihan mengenai diversifikasi olahan kacang mete, sementara pada tahun 2021, pelatihan terkait manajemen dan operasional usaha dilaksanakan.

Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, dengan harapan dapat mengembangkan produk mereka. Informan dari dinas Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, menyatakan bahwa pelatihan diadakan secara teratur dan tema kegiatan diubah setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada seperti yang ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut;

*“Pelatihan kami lakukan setiap tahun, pelaksanaan dan tema kegiatan kami ganti setiap tahun menyesuaikan kondisi yang ada. Tahun lalu kami melakukan pelatihan diversifikasi olahan kacang mete untuk meningkatkan produk usaha UMKM. Tahun ini kami melakukan pelatihan diversifikasi olahan rumput laut dan pelatihan pembuatan bakpia dengan isian sayuran berbasis lokal”*

Menurut informan dari UMKM menjelaskan jika pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah dinilai sangat bermanfaat dalam pengembangan produk mereka. Para pelaku UMKM menyatakan bahwa pelatihan tersebut membantu mereka dalam meningkatkan kualitas dan variasi produk yang mereka tawarkan seperti yang ditunjukkan melalui kutipan wawancara berikut;

*“Pelatihan rutin diadakan oleh pemerintah kota, saya selalu mengikuti pelatihan yang diadakan. Pelatihan-pelatihan tersebut berguna bagi saya untuk terus mengembangkan produk”*

Senada dengan informan tersebut, informan lainnya juga mengemukakan bahwa;

*“Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemkot sangat bermanfaat, dari pelatihan yang diadakan saya bisa mengembang jenis produk saya”.*

Dengan melihat hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau merupakan salah satu bentuk fasilitas yang efektif dari pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM. Pelatihan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan kemajuan sektor UMKM secara keseluruhan.

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM juga mengungkap bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan dalam produksi, tetapi juga mencakup pengurusan administrasi yang berhubungan dengan aktivitas produksi hingga pemasaran. Pelatihan yang diadakan membantu dalam memahami proses administrasi yang diperlukan untuk mengelola usahanya secara efisien, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengaturan distribusi produk. Terutama mengenai pemahaman tentang manajemen keuangan dan pembukuan usaha yang diperoleh melalui pelatihan tersebut. Dengan memahami

administrasi yang baik, para pelaku UMKM dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan profitabilitas usaha mereka.

### ***Kebijakan yang Mempermudah Pengembangan UMKM***

Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah pengembangan UMKM juga harus memperhatikan aspek debirokratisasi. Kebijakan yang dikeluarkan harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan upaya untuk mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan memastikan bahwa proses implementasi kebijakan tersebut tidak membebani UMKM dengan aturan yang berlebihan.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau dalam pengembangan UMKM di Kota Baubau dengan mengeluarkan kebijakan yang mempermudah pelaku UMKM dalam pengurusan izin dan aturan usaha. Dimana pemerintah kota telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam upaya mempermudah urusan para pelaku UMKM terkait aturan-aturan, ini kemudian terlihat melalui kutipan wawancara berikut;

*“Terkait aturan perundang-undangan dalam pengembangan UMKM, Pemerintah Kota Baubau sudah mengeluarkan Perda Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah yang berorientasi untuk memudahkan urusan-urusan para pelaku UMKM terkait aturan-aturan. Kami mengarahkan pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usahanya”*

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau sebagai regulator terlihat dalam kemudahan yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam mengurus perizinan dan administrasi usaha. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan regulasi yang memadai untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM di Kota Baubau.

## **PEMBAHASAN**

### **Debirokratisasi dalam Upaya Pemerintah Mendorong UMKM**

Dalam konteks upaya pemerintah Kota Baubau untuk mendukung perkembangan UMKM, penekanan pada pendekatan debirokratisasi sangatlah relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban birokrasi yang dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan UMKM. Evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah perlu diperhatikan dalam konteks ini.

Pertama, Langkah-langkah yang diambil pemerintah Kota Baubau dalam memberdayakan komunitas kreatif, terutama dengan menyediakan akses yang lebih mudah melalui grup WhatsApp, mencerminkan upaya menuju debirokratisasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip efisiensi dan aksesibilitas. Dalam konteks ini, teori debirokratisasi menekankan pentingnya mengurangi birokrasi yang memperlambat proses dan menghalangi partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini, pemerintah Kota Baubau menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat kreatif dengan

mengadopsi teknologi sebagai alat untuk merampingkan proses komunikasi dan kolaborasi. Dalam konsep *public value*, upaya pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih efisien dan responsif merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang memperhatikan nilai-nilai publik yang dihasilkan. Dengan menyediakan akses melalui platform digital seperti WhatsApp, pemerintah Kota Baubau dapat mengurangi hambatan administratif yang seringkali menjadi penghalang bagi partisipasi masyarakat dalam inisiatif kreatif dan pengembangan komunitas. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang lebih lancar antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memperluas kesempatan partisipasi dan kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan, sesuai dengan prinsip-prinsip debirokratisasi. Dalam teori debirokratisasi, terdapat peringatan bahwa mengurangi birokrasi bukanlah tujuan akhir, tetapi harus diikuti dengan evaluasi terhadap dampaknya terhadap kualitas layanan dan kemampuan institusi dalam mendukung inovasi. Pendekatan berbasis institusi juga menyoroti pentingnya memperbaiki kualitas institusi dan proses pengambilan keputusan, bukan hanya mengurangi jumlah aturan dan prosedur. Dalam konteks pemberdayaan UMKM di Kota Baubau, pendekatan ini menekankan pentingnya membangun sistem yang responsif dan inklusif, yang tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi tetapi juga memperkuat kapasitas institusional dalam mendukung UMKM. Oleh karena itu, kontradiksi terjadi antara upaya untuk mengurangi birokrasi dengan perlunya evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas institusi. Menurut ahli, sementara langkah-langkah debirokratisasi dapat mempercepat akses dan memfasilitasi pertukaran informasi, upaya ini juga harus diimbangi dengan evaluasi yang cermat terhadap dampaknya terhadap kualitas layanan dan kemampuan institusi dalam mendukung inovasi, untuk memastikan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Kedua, Penyediaan dukungan modal langsung pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering kali merupakan tantangan karena kompleksitas birokrasi yang terkadang membebani UMKM. Dalam menjawab tantangan ini debirokratisasi di sektor publik, menekankan pentingnya menyederhanakan proses administratif untuk meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan. Prinsip ini dapat diadopsi dalam konteks penyediaan dukungan modal langsung pada UMKM dengan merancang prosedur yang lebih sederhana dan cepat. Hal ini sejalan dengan perlunya inovasi dalam desain kebijakan untuk mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip debirokratisasi dalam penyediaan dukungan modal langsung pada UMKM perlu memperhatikan keseimbangan antara menyederhanakan proses, menjaga transparansi, dan meningkatkan efisiensi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

Ketiga, Memberikan pelatihan dan bantuan subsidi adalah langkah konkret dalam memberdayakan UMKM yang mencerminkan prinsip-prinsip debirokratisasi. Teori debirokratisasi menekankan perlunya mengurangi birokrasi yang berlebihan dan menyulitkan proses akses terhadap sumber daya, seperti pelatihan dan subsidi. Dengan menyediakan bantuan subsidi, pemerintah atau lembaga terkait dapat membantu UMKM mengatasi kendala finansial yang seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan usaha. Pendekatan ini juga mencerminkan upaya untuk menyederhanakan proses akses terhadap dukungan, seiring dengan prinsip debirokratisasi yang menekankan efisiensi dan aksesibilitas. Sebagai contoh, seperti yang dikemukakan oleh ahli manajemen publik, David Osborne, dalam bukunya "Reinventing Government", subsidi yang diberikan secara tepat sasaran dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi birokrasi yang tidak perlu dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memberikan pelatihan dan subsidi secara langsung kepada UMKM, pemerintah dapat mempercepat proses pengembangan usaha tanpa harus melalui proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat kapasitas UMKM secara langsung, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip debirokratisasi.

Para ahli dalam paradigma institusional menekankan pentingnya memperhatikan dinamika internal dari institusi tersebut, termasuk struktur kelembagaan, proses pengambilan keputusan, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap proses penyediaan pelatihan dan subsidi harus dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana kebijakan dan praktik-praktik tersebut tercermin dalam struktur dan budaya organisasi pemerintah Kota Baubau. Dengan demikian, pendekatan debirokratisasi dalam konteks institusional menekankan pentingnya membangun institusi yang responsif, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal maupun internal.

Terakhir, dalam pengeluaran kebijakan yang mempermudah pengembangan UMKM, langkah-langkah yang diambil Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, seperti penerbitan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, menunjukkan upaya untuk mengurangi beban birokrasi. Namun, perlu dievaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan memastikan bahwa proses implementasinya tidak membebani UMKM dengan aturan yang berlebihan. Dalam konteks pengeluaran kebijakan yang mempermudah pengembangan UMKM, pendekatan debirokratisasi seharusnya dipraktikkan dengan memperhatikan konteks institusionalnya. Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau, seperti penerbitan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, menunjukkan respons positif terhadap kebutuhan akan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam mendukung UMKM.

Namun, untuk memastikan keberhasilan dalam mengurangi beban birokrasi, evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan.

Debirokratisasi seharusnya mengarah pada penyederhanaan proses, pengurangan aturan yang berlebihan, dan peningkatan aksesibilitas bagi UMKM tanpa mengorbankan kepentingan umum dan tata kelola yang baik. Dalam konteks institusional, hal ini mengharuskan pemerintah Kota Baubau untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan struktur dan budaya organisasi yang mendukung inovasi, responsif terhadap kebutuhan pasar, dan memperkuat kapasitas UMKM. Keberhasilan debirokratisasi dalam kondisi ini akan tercermin dalam peningkatan daya saing UMKM, peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya berfokus pada pemangkasan birokrasi, tetapi juga pada peningkatan layanan dan dukungan yang efektif bagi UMKM.

### ***Debirokratisasi dan Kontradiksi pada Penurunan Kontribusi UMKM***

Debirokratisasi sebagai upaya untuk mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan aksesibilitas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Baubau merupakan langkah yang diharapkan dapat memperkuat sektor UMKM dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, terdapat kontradiksi yang muncul antara upaya debirokratisasi dan lemahnya kontribusi UMKM terhadap PDRB. Analisis ini akan melihat kontradiksi tersebut dari perspektif teori ekonomi pembangunan, dengan mempertimbangkan konsep debirokratisasi, faktor-faktor penyebab lemahnya kontribusi UMKM terhadap PDRB, serta tantangan dan peluang yang ada.

Dalam konteks teori ekonomi pembangunan, debirokratisasi dapat dilihat sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam mendukung pembangunan ekonomi. Namun, kontradiksi muncul ketika meskipun upaya debirokratisasi telah dilakukan, kontribusi UMKM terhadap PDRB masih lemah. Salah satu gejala yang bisa diidentifikasi dari kondisi ini adalah adanya kesenjangan antara perubahan struktural (debirokratisasi) dan dampak nyata pada sektor UMKM. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, terdapat kendala struktural dalam ekosistem UMKM yang tidak hanya terbatas pada aspek administratif. Faktor-faktor seperti akses terhadap modal, keterampilan manajerial, infrastruktur, dan pasar juga berperan penting dalam menentukan pertumbuhan dan kontribusi UMKM terhadap PDRB. Meskipun debirokratisasi dapat mengurangi hambatan administratif, tantangan lain masih membatasi potensi pertumbuhan UMKM.

Kedua, terdapat masalah dalam implementasi kebijakan dan program-program yang mendukung UMKM. Meskipun ada langkah-langkah debirokratisasi yang dilakukan, namun jika



tidak diikuti dengan implementasi kebijakan yang efektif dan program-program yang tepat sasaran, kontribusi UMKM terhadap PDRB tetap akan terbatas.

Dari perspektif ekonomi pembangunan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan. Salah satu solusinya adalah dengan mengintegrasikan debirokratisasi dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang komprehensif. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap modal, memperkuat infrastruktur, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM, serta mendorong terciptanya pasar yang inklusif bagi produk-produk UMKM ([Ting & Feng, 2019](#)).

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan. Pertama, dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, potensi UMKM untuk berkontribusi terhadap PDRB dapat ditingkatkan. Kedua, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, UMKM dapat memiliki akses yang lebih luas ke pasar dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing mereka.

Dalam pendekatan pemerintahan, analisis terhadap kontradiksi antara debirokratisasi dan lemahnya kontribusi UMKM terhadap PDRB di Kota Baubau dapat disajikan dengan menggunakan dua pendekatan utama: pendekatan institusional dan pendekatan administratif.

Pertama, dari pendekatan institusional, debirokratisasi dapat dipandang sebagai strategi untuk merombak atau mereformasi struktur institusi pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Namun, lemahnya kontribusi UMKM terhadap PDRB mengindikasikan adanya kegagalan dalam implementasi kebijakan tersebut. Analisis dari perspektif institusional dapat menyoroti beberapa hal, termasuk kesenjangan antara desain kebijakan dan kenyataan di lapangan, serta kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam pencapaian tujuan.

Kedua, dari pendekatan administratif, debirokratisasi diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja administratif pemerintah dengan cara mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan memperbaiki proses-proses pelayanan publik. Namun, jika meskipun upaya debirokratisasi telah dilakukan namun kontribusi UMKM terhadap PDRB masih lemah, hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan administratif. Analisis dari perspektif administratif akan menyoroti kendala-kendala dalam implementasi kebijakan, termasuk kurangnya kapasitas birokrasi dalam menerapkan kebijakan secara efektif, ketidakmampuan untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural di luar kendali administrasi, serta adanya resistensi atau kepentingan-kepentingan politik yang menghambat proses debirokratisasi ([Peters, 2021](#)).

Perbandingan antara kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan debirokratisasi dan kontribusi UMKM terhadap PDRB tidak hanya bergantung pada perubahan struktural dalam

institusi pemerintahan, tetapi juga pada efektivitas administratif dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang komprehensif, mengintegrasikan aspek-aspek institusional dan administratif, serta memperhatikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja UMKM. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih efektif dalam meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDRB melalui langkah-langkah debirokratisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya debirokratisasi yang dilakukan pemerintah Kota Baubau telah memberikan dampak positif dalam memperkuat sektor UMKM, meskipun masih lemah dalam hal kontribusi UMKM terhadap PDRB. Langkah-langkah debirokratisasi yang diambil, seperti memberdayakan komunitas kreatif melalui platform digital, menyederhanakan proses administratif dalam penyediaan dukungan modal langsung dan pelatihan, serta penerbitan kebijakan yang mempermudah pengembangan UMKM, telah memperluas aksesibilitas dan responsivitas layanan bagi UMKM. Namun, temuan juga mengungkap beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, masih ada kendala struktural dalam ekosistem UMKM yang tidak hanya terkait dengan aspek administratif, seperti akses terhadap modal dan infrastruktur. Kedua, implementasi kebijakan dan program-program pendukung UMKM masih belum optimal, mengakibatkan keterbatasan kontribusi UMKM terhadap PDRB. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalam dalam menganalisis faktor-faktor struktural yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM, seperti akses terhadap modal dan infrastruktur. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi kebijakan dan program-program yang mendukung UMKM, dengan memperhatikan faktor-faktor administratif dan institusional yang memengaruhi efektivitasnya.

## **REFERENSI**

- Csath, M. (2021). Crisis Situations: How Should Micro, Small and Medium Enterprises Handle Them With A Long Term View? In *Development and Learning in Organizations* (Vol. 35, Issue 3). <https://doi.org/10.1108/DLO-04-2020-0086>
- Dinutistomo, I. A., & Lubis, A. W. (2021). MSME Lending and Bank Efficiency: Evidence from Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 16(3). [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(3\).2021.09](https://doi.org/10.21511/bbs.16(3).2021.09)
- Fasyehhudin, M., Jaya, B. P. M., & Rahman, Y. M. (2022). Deregulation and Debureaucratization of Business Licensing Services Through The Online Single Submission (OSS) System in Local Governments Post Government Regulation Number 24 of 2018 Concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.1.3129>
- Harseno, R. M. (2017). Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi Regulasi Ekonomi Kemaritiman sebagai Katalisator Nawacita Indonesia Poros Maritim Dunia. *Gema Keadilan*, 4(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3773>

- International Finance Corporation. (2021). The Unseen Sector: A Report on the MSME Opportunity in South Africa. *International Finance Corporation*.
- Johnston, J. M., & Holt, S. B. (2021). Examining the Influence of Representative Bureaucracy in Public and Private Prisons. *Policy Studies Journal*, 49(2). <https://doi.org/10.1111/psj.12367>
- Kertati, I. (2021). Deregulasi dan Debirokratisasi dalam Pembangan UMKM Menghadapi COVID-19. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(2). <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2525>
- Kovač, P. (2021). Debureaucratization Limits in Administrative Procedures Codification: Lessons from Slovenia. *Administrative Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/admsci11010001>
- Lampropoulou, M. (2021). Agencification in Greece: A Parallel Public Sector? *International Journal of Public Sector Management*, 34(2). <https://doi.org/10.1108/IJPSM-09-2020-0252>
- Martini, A., Suradinata, E., Kusworo, K., Lambelanova, R., & Thahir, M. I. (2019). The Effect of Organizational Transformation, Compensation and Organizational Culture on Performance of Regional Government Bureaucracy in Sumedang Regency West Java Province. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(1). <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i1.14439>
- Mey, D., Sahar, S., & Widayati, W. (2018). Analisis Potensi Lapangan Kerja Di Kota Baubau. *JAGAT (Jurnal Geografi Aplikasi Dan Teknologi)*, 2(1).
- Noegroho, A. B. A., & Arif, L. (2023). Collaborative Governance dalam Pembangunan UMKM Puduk Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Journal Publicuho*, 5(4). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85>
- Peters, B. G. (2021). Understanding Comparative Bureaucracy. In *Administrative Traditions*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198297253.003.0001>
- Prasetyo, P. E. (2020). The Role of Government Expenditure and Investment for MSME Growth: Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.471>
- Putri, F., Sinulingga, W., Hidayati, S., & Juliza. (2020). Micro, Small and Medium Enterprise Strategy to Improve Competitiveness in The Era of The ASEAN Economic Community (AEC). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 801(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/801/1/012124>
- Salsabila, D., Ma'ruf, A. R., & Adharani, Y. (2021). Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9824>
- Seno, R. H. (2020). Reformasi Administrasi di Korea Selatan: Sebuah Pembelajaran Kesuksesan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 23(2). <https://doi.org/10.31845/jwk.v23i2.667>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*.
- Supardi, S., Hariyadi, S., & Fahrudin, A. (2017). Analisis Keberlanjutan Pembangunan Kota Tepian Pantai (Studi Kasus: Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 5(3). <https://doi.org/10.14710/jwl.5.3.188-204>
- Syafiq, M. (2019). Birokrasi di Era Revolusi (Studi Pelayanan Perijinan Memulai Usaha di Indonesia). *Journal of Social Politics and Governance Vo. 1 No. 1 Juni 2019*, 1(1).
- Ting, G., & Feng, C. (2019). Institutional Reorganization and its Impact on Decentralization. In *Changing Central-Local Relations in China: Reform and State Capacity*. <https://doi.org/10.4324/9780429038761-4>
- Tsvykh, V., & Nelipa, D. (2019). Contemporary Theory of Public Administration in the USA: from Post-Bureaucracy Paradigm by B. Armajani and M. Barzeley to Postmodern Concept by Ch. Fox and H. Miller. *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration*, 11(1). <https://doi.org/10.17721/2616-9193.2019/11-6/7>
- Vallentin, S. (2022). Trust, Power and Public Sector Leadership: A Relational Approach. In *Trust, Power and Public Sector Leadership: A Relational Approach*.

<https://doi.org/10.4324/9780429431104>

- Vodenko, K. V., Belasheva, I. V., Zalevskaya, A. A., Polshakova, I. N., & Tleptserisheva, S. A. (2019). The State Management of Development of The Professional and Qualification Potential in Russian Higher Education. *On the Horizon*, 27(3–4). <https://doi.org/10.1108/OTH-07-2019-0047>
- Wakisaka, D. (2022). Beyond Street-Level Bureaucracy: The Organisational Culture of Migration Policy-Making and Administrative Elites. *International Migration*, 60(4). <https://doi.org/10.1111/imig.12919>
- Wang, Y., Qi, Y., & Chen, G. (2022). Participatory Governance and Local Government Responsiveness: Evidence from Participation in Politics on Television in China. *Local Government Studies*, 48(5). <https://doi.org/10.1080/03003930.2021.2009805>
- Yusuf, S., Seftiana, E., & Lidyah, R. (2022). Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Sendi Perekonomian Indonesia. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.26905/jrei.v3i2.9122>
- Zhang, Y., Zhai, W., & Li, W. (2023). Performance Ranking, Span of Control, and Grassroots Government Responsiveness. *Review of Policy Research*. <https://doi.org/10.1111/ropr.12565>